

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMANFAATAN *E-PLANNING* RENCANA  
KERJA TAHUNAN DENGAN SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI KANTOR  
BAPPEDA KABUPATEN BONE**

**RISWAL ANDIKA**

**E011191067**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRAK

**Riswal Andika (E011191067) Analisis Pemanfaatan E-Planning Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone. 129 Halaman + 5 Gambar + 11 Tabel + Lampiran, dibawah bimbingan Dr. Suryadi Lambali, MA dan Dr. Muhammad Yunus, MA.**

*E-Planning* (Elektronik Perencanaan) merupakan suatu aplikasi yang dimanfaatkan untuk membantu dalam memudahkan perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis pada daring. Sistem informasi perencanaan pembangunan (*E-Planning*) bertujuan untuk memperbaiki hasil informasi yang dihasilkan serta membuat perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota bagi pemerintah daerah.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan e-planning rencana kerja tahunan dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di kantor badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten bone. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung dilapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan menggunakan 3 elemen sukses *E-Government* yang kemudian peneliti terapkan pada *E-Planning* menurut Richardus Eko Indrajit (2016) yaitu, Support, Capacity, Dan Value.

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan *e-planning* rencana kerja tahunan dengan SIPD di Kantor BAPPEDA Kabupaen Bone berjalan dengan baik, dilihat dari hasil dokumen perencanaan serta proses perencanaan dan pembangunan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bone.

**Kata Kunci:** *E-Planning*, *SIPD*, Rencana Kerja Tahunan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRACT

**Riswal Andika (E011191067) Utilization Analysis *E-Planning* The Annual Work Plan With Local Government Information System (Sipd) At Bappeda Office Bone District . 129 Courtyard + 6 Picture + 11 Table + Attachments, Under The Guidance Of Dr. Suryadi Lambali, Ma And Dr. Muhammad Yunus, Ma.**

*E-Planning* (Planning Electronic) is an application that is used to help in making it easier for the formulation of policy in preparing the online arrangement of regional development plans. The development information planning information system (E-Planning) aims to improve the results of the information produced and make development planning to be consistent from the village/village level to the Regency/City level for regional governments.

In general, this study aims to analyze the use of e- Planning annual work plans with local government information systems (SIPD) at the planning and development agency of bone district. The method used in this study is qualitative that is descriptive where the type of data consists of primary data obtained through interviews and observations directly in the field, while secondary data sourced from the data obtained from the Qualitative Agency and Development of Regency using 3 successful E-Government which then applied to E-Planning, according to Richardus Eko Indrajit namely 2016 is Support,Capacity, Dan Value.

This study indicates that it is generally the implementation of e-planned work plans with SIPD at Bone Regency BAPPEDA Office runs well, seen from the results of planning documents and development processes provided that have been in accordance with the needs of the community in Bone Regency.

**Keywords: E-Planning, SIPD, Annual Work Plan.**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riswal Andika  
NIM : E011191067  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Analisis Pemanfaatan *E-Planning* Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone" adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dalam daftar pustaka.

Makassar, 24 November 2022

Yang menyatakan,



Riswal Andika  
E011191067



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riswal Andika  
NIM : E011191067  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Analisis Pemanfaatan *E-Planning* Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone.

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 24 November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Suryadi Lambali, MA.**  
NIP. 19590118 198503 1 006

  
**Dr. Muhammad Yunus, MA.**  
NIP. 19591030 198703 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

  
**Dr. Nardin Nara, M.Si.**  
NIP. 19630903 198903 1 002



v



### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riswal Andika  
NIM : E011191067  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Analisis Pemanfaatan *E-Planning* Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone.

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada hari, Kamis, 24 November 2022.

#### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Suryadi Lambali, MA.

Sekretaris Sidang : Dr. Muhammad Yunus, MA.

Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.Si.

2. Drs. Nelman Edy, M.Si.

(.....)

(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikumwarahmatullahwabarakatuh*

Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas penulis haturkan selain puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang karena perkenan dan ridho-Nyalah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pemanfaatan *E-Planning* Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Tidak terluput sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Rasul Agung yang tak pernah mengenal lelah membawa risalah kebenaran agar dapat mengantarkan manusia dari kehidupan yang biadab menuju kehidupan yang penuh adab seperti sekarang ini. Dalam pembuatan dan proses penyusunan skripsi ini, penulis begitu menyadari terdapat banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Olehnya itu, penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini begitu banyak pihak yang mendukung dan menjadi penyemangat penulis. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis utamanya kepada ayah dan ibunda tercinta, **Suhardi** dan **Wahidah S.** yang tak henti-hentinya memberi dukungan baik moral maupun material kepada penulis, begitupun kepada ke 3 kakak dan 1 adik penulis, **Rivaldi Andika**, **Rifka Andika P**, **Rian Andika** dan **Rifki Andika P.** yang senantiasa menjadi penghibur di kala penulis merasa jenuh dalam menyusun skripsi ini. Sekiranya seluruh jasa tersebut ditampakkan, tentu penulis tak dapat membalas seluruhnya begitu besarnya jasa-jasa mereka terhadap penulis. Dengan hati yang tulus dan penuh harap, penulis mendoakan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.



Selain itu,selama menempuh pendidikan dan menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, motivasi,dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itusebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin pada masanya.
2. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta staf.
3. **Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta staf.
4. **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang senantiasa membina dan menasehati penulis.
5. **Dr. Muhammad Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang senantiasa member kelancaran administratif kepada penulis selama menempuh studi.
6. **Dr. Suryadi Lambali, MA.** Selaku Dosen Pembimbing I yang sejak awal perkuliahan tak henti-hentinya member nasehat, motivasi, dan arahan untuk penulis dengan penuh kesabaran. Penulis paham walau di tengah kesibukan dan jadwal yang begitu padat, beliau senantiasa meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Olehnya itu, penulis sekali lagi berterima kasih akan jasa Bapak dan berharap semoga Bapak senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT.
7. **Dr. Muhammad Yunus, MA.** Selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan member masukan terhadap penulis meskipun ditengah kesibukannya, beliau senantiasa meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Olehnya itu,penulis sekali lagi berterima kasih akan jasa Bapak dan berharap semoga Bapak senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT.
8. **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** selaku Dosen Penguji dalam Seminar Proposal dan Ujian Skripsi. Sekali lagi terima kasih atas saran perbaikan dan masukan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.



9. **Drs. Nelman Edy, M.Si.** selaku Dosen Penguji dalam Seminar Proposal dan Ujian Skripsi. Sekali lagi terima kasih atas saran perbaikan dan masukan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh **Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS** atas segala ilmu dan nasehat yang telah diberikan untuk penulis selama lebih dari 3 tahun. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat dan berkah bagi penulis.
11. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS** (Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili, Ibu Mantasia, dan Ibu Nurbaya) atas pelayanan dan kenyamanan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani studi.
12. **Pegawai Sub Bagian Kemahasiswaan FISIP UNHAS** (Ibu Ija, dan Pak Ancu) yang telah memberi kelancaran bagi penulis dalam pengurusan berkas kemahasiswaan, menerima penulis untuk magang, dan senantiasa mendengarkan curahan hati penulis selama ini.
13. **Dr. H. Ade Fariq Ashar, S.STP, M.Si.** selaku Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di kantor Bapak. Tanpa dukungan Bapak beserta staf sulit rasanya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah menjadi tempat belajar, berproses, dan tempat penulis memperoleh begitu banyak pengalaman berorganisasi dan cara beradaptasi dengan dunia luar. Serta telah menjadi wadah penulis untuk mengembangkan potensi dikampus.
15. **Departemen Keilmuan dan Penalaran“ DekapeFamily” HUMANIS FISIP UNHAS** (Ahmad Farhan, S.A.P Indrah Anugrah Wijaya, Wahyuli Rahman, S.A.P, Siti Khadijah Amalia, S.A.P. Yunita Talib, S.A.P Andi Reski Apriani, S.A.P, Ahmad Dyandi Prilasandi, Naylawati Bachtiar, dan Asriana) yang telah menjadi *partner* handal dalam segala kondisi selama kepengurusan.
16. **Presidium UKM LDM LDK IBNU KHALDUN** (Ahmad Akbar, Reski Erik Sandi, Adi Jahyadi, Ahmad Diandy Prilasandi, dan Firmansya) yang telah menjadi kawan debat demi mencari solusi terbaik selama memimpin kepengurusan.

17. **UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS** yang sejak awal perkuliahan begitu sabar dan istiqomah dalam menebar kebaikan dan member nasehat termasuk kepada penulis.
18. **Keluarga Besar Rumah Bina Karakter (RBK)** yang bersedia menjadi wadah sekaligus rumah kedua bagi penulis dalam mengembangkan minat kepenulisannya serta soft skill penulis.
19. **Keluarga Besar Mesjid Al Nur** yang tak henti-hentinya mendorong penulis dalam memperluas ilmu agama serta senantiasa memberikan fasilitas tempat tinggal sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu.
20. Teman-teman **KKN Gelombang 108 Posko 8** (Perhutanan Sosial) Kabupaten Bone yang senantiasa menebar keceriaan dan pengalamannya di Posko yang tak terlupakan selamanya.
21. Rekan **“Penghuni Mesjid Al Nur”** (Wahyu Iqbal Maulana, S.Si, Abrian Wira Sakti, S.Si, Imawan Susanto, Asyrof, dan Suparman) yang telah menjadi teman sekaligus saudara dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam hal keagamaan.
22. Angkatan **MIRACLE 2019** tersayang, terima kasih atas kekompakan, suka duka yang telah dilalui bersama, canda tawa yang telah mengisi hari-hari penulis sejak awal pertemuan di kampus. Semoga rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang terjalin selama ini tetap berlanjut selamanya. Sukses selalu untuk ke 87 teman tercinta penulis kedepannya.
23. Angkatan **LENTERA 2018, PENA20, dan LEGION21**, Serta **Ocean 2022** yang telah membersamai penulis selama menyelesaikan studi di kampus.
24. **Departemen Minat dan Bakat “DeEmBeCeria” HUMANIS FISIP UNHAS** (Naurah Asbachri, Chandra Kirana Mario, Jultriska Ratu Matasak, Revi Reul Buntugayang, M. Fahmi Yusri Kadir, Nur Khafifah Rahman, Nurul Ismi Syah, Dan Rifdha Alya Faisal) yang telah menjadi *partner* handal dalam segala kondisi selama kepengurusan.
25. Saudara **Firmansya, Wahyu Iqbal Maulana, Abrian Wira Sakti, Asyrof, Imawan Susanto, dan Suparman, Serta Kak Jumardin** yang telah penulis anggap seperti saudara serta kakak sendiri. Terima kasih atas kesetiaan, kepedulian, kesabaran, dan waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan curahan hati dan pikiran penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Sukses selalu untuk kalian semua.

26. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga segala yang diupayakan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan yang besar dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi para pembaca yang budiman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 16 November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Konsep Dan Pengertian perencanaan.....	12
1. Pengertian Perencanaan.....	12
2. Perencanaan Pembangunan.....	17
B. Konsep <i>Good Governance</i> Dan <i>E-Government</i> .....	21
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	21
2. Pengertian E-Government.....	27
C. <i>E-Planning</i> .....	31
1. Pengertian <i>E-Planning</i> .....	31
2. Tujuan Dan Manfaat <i>E-planning</i> .....	40
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>E-planning</i> .....	42

D. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) .....	43
E. Kerangka Pikir.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Fokus Penelitian.....	51
D. Unit Analisis .....	51
E. Sumber Data.....	51
F. Informan.....	52
G. Teknik Pengumpulan Data .....	52
H. Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum.....	55
1. Gambaran Umum Bappeda.....	55
2. Visi Dan Misi .....	58
3. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	59
4. Struktur Organisasi.....	64
5. Dokumen – Dokumen SIPD .....	66
6. Kondisi Kepegawaian.....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. <i>Support</i> .....	78
B. <i>Capacity</i> .....	86
C. <i>Value</i> .....	100
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

LAMPIRAN.....	116
---------------	-----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) .....	45
Gambar II.2 Kerangka Pikir.....	47
Gambar IV.1 Peta Wilayah Kabupaten Bone .....	57
Gambar IV.2 Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Bone.....	55
Gambar IV.3 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bone.....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel.1 1 Jumlah Pegawai Fungsional Perencana dan Non Perencana Pada Kantor BAPPEDA Kab. Bone.....	8
Tabel IV.1 Jumlah Pegawai PNS dan CPNS Serta Non ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	72
Tabel IV.2 Jenis - Jenis Fungsional Perencana Pada Kantor Bappeda Kabupaten Bone.....	70
Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
Tabel V. 1 Kebijakan Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) .....	79
Tabel V. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone .....	83
Tabel V. 3 Kebijakan Pemberian Reward Dan Punishment Kepada ASN Dan Non ASN BAPPEDA Kabupaten Bone .....	90
Tabel V. 4 Daftar Inventaris Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2022 ...	94
Tabel V. 5 Kegiatan Pelatihan Fungsional Perencana Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.....	98
Tabel V.6 Data Analisis Dokumen Hasil Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone .....	104
Tabel V.7Jenis Aplikasi Dalam Proses Perencanaan Dan Pembangunan Serta Penganggaran Daerah Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone .....	109

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tuntutan untuk senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas di berbagai sektor. Hal ini membuka peluang yang besar untuk Indonesia secara umum dan bagi instansi atau OPD secara khususnya agar mampu mengadopsi serta memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam tatanan pemerintahan. Sehingga untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah berbasis elektronik.

Teknologi tentu menjadi alat yang sangat penting dalam proses pengembangan kualitas pelayanan yang bersih, transparan, efektif dan efisien untuk tatanan pemerintahan yang lebih baik dan tentu hal tersebut menjadi harapan seluruh masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Pemerintah saat ini dituntut untuk mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi saat ini, serta menjadi jawaban atas kebutuhan dan keinginan publik yang semakin kompleks yang menuntut untuk dipenuhi.

*E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. *E-Government* telah disahkan melalui Inpres No. 3 Tahun

2003. Artinya dengan adanya Inpres tersebut maka pengembangan *e-government* mengikat seluruh lembaga yang ada, sehingga dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan *e-government*. Dengan begitu setiap elemen pemerintah harus mampu memberdayakan ataupun memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam proses pemerintahannya supaya dapat tercipta pelayanan yang baik sesuai harapan masyarakat. Dalam pemenuhan tuntutan publik maka pemerintah kemudian berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan cara menjadikan teknologi informasi sebagai jembatan serta batu loncatan dalam membangun pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan meletakkan supremasi hukum sebagai landasan sehingga hal ini harus dikembangkan melalui pemanfaatan *E-Government* (Elektronik Pemerintahan).

*E-Government* merupakan aplikasi teknologi informasi yang diharapkan mampu mendorong dalam peningkatan *performance* serta pelayanan pemerintahan yang dimana dapat memenuhi harapan publik akan peningkatan kualitas pemerintahan. Tuntutan dalam perbaikan pelayanan publik sangat diperlukan dan sangat berkaitan dengan inovasi dalam birokrasi serta pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk perbaikan peningkatan produktivitas, sistem pelayanan, maupun efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian pemanfaatan dalam pengembangan informasi dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas,serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik seharusnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan harapan publik.

Dalam konsep efektif dan efisien ini selaras dengan tujuan dan harapan dikembangkannya *e-government* yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabilitas dalam rangka mendukung *good governance*. Hadirnya suatu proses penggunaan dan

pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk mengoperasikan sistem pemerintahan inilah yang disebut dengan *e-government*. Terdapat 2 hal penting dalam memaknai *e-government*, yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet sebagai alat bantu dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pada dasarnya substansi ungkapan *electronic government* atau yang disebut *e-government* untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, yang dimana internet disini dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya.

Selain itu hal serupa dalam pengadopsian ini diharapkan supaya tercapainya tujuan yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya. Salah satu riset yang dilakukan bahwa pemerintah dalam hal ini harus mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka memenuhi apa yang masyarakat inginkan, yang nanti pada akhirnya akan tercipta sebuah *public value* dengan kualitas yang lebih baik.

Tentu dalam pelaksanaan *e-government* demi pemenuhan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat maka sangat dibutuhkan dasar atau landasan dalam pelaksanaannya salah satunya dengan adanya indikator yang dapat dijadikan dasar dalam penerapannya. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan menurut salah satu hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* yang dikutip dari (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011:36). Dimana dalam riset tersebut menjelaskan bahwa untuk pengimplementasian konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki

dan diperhatikan dengan baik. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

- 1) *Support Elemen* support adalah elemen paling penting dari 3 elemen dalam pengembangan *e-government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat (pemeintah) publik. Hal ini agar konsep *e-government* dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* akan sukar untuk dapat terlaksana.
- 2) *Capacity Elemen* capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat terimplementasikan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:
  - a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*.
  - b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*.
  - c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
- 3) *Value Elemen* value pada dasarnya berkiblat pada kebermanfaatan yang diperoleh pihak pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan sebab mereka yang merasakan kebermanfaatan dari pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah.

Selain dengan adanya elemen – elemen sukses yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat pula tahapan *e-government* dalam penerapannya sehingga mampu menciptakan penerapan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Nugroho (2007:42) pada dasarnya tahapan dalam perkembangan implementasi *e-government* di Indonesia, dibagi menjadi empat :

1. *Web Presence*, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi Email dalam website pemerintah.
3. *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation*, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Dengan adanya indikator atau elemen sukses serta tahapan dalam implementasi *e-government* maka hal ini harus menjadi salah satu acuan dalam penerapannya supaya tercipta pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan yang baik tentu menjadi harapan dan cita – cita yang diimpikan oleh seluruh pihak baik pihak masyarakat selaku penerima layanan begitu pula dengan pihak pemerintah selaku pemberi layanan.

Dengan hadirnya *e-goverment* sehingga tercipta suatu turunan dari berbagai sektor dengan menggunakan elektronik salah satunya dengan adanya *E-Planning* (elektronik perencanaan). *E-planning* saat ini menjadi salah satu

bentuk penerapan *e-government* namun *e-planning* lebih kepada bagaimana elektronik tersebut dipergunakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa maka hak dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin tinggi baik itu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi yang dimiliki. Agar mampu melaksanakan hak dan tanggungjawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus mampu merancang dan membuat suatu kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *good governance*. Dengan begitu maka akan tercipta suatu tatanan pemerintah yang baik (*good governance*).

Selain itu Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang "tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja daerah".

Perencanaan pembangunan dalam sistem pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini sangat dibutuhkan dukungan sistem informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, memproses kebutuhan data dan penyimpanan data. Kalaborasi antara sistem informasi manajemen dengan perencanaan pembangunan daerah sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan



memiliki arah dan tujuan memperbaiki hasil informasi yang dihasilkan, selain itu juga akan membantu supaya perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota baik bagi pemerintah daerah dan sampai dengan tingkat nasional bagi pemerintah pusat.

Salah satu kabupaten yang telah menerapkan *e-planning* atau sistem informasi dalam proses perencanaannya yaitu Kabupaten Bone. Dimana berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengisyaratkan bahwa adanya aplikasi yang kemudian menjadi media teknologi informasi yang digunakan dalam proses perencanaan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (BAPPEDA). Tentu dengan adanya aplikasi *e-planning* dalam proses perencanaan diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada para perencana dalam proses perencanaannya sebab diketahui bahwa dalam proses perencanaan tentu membutuhkan proses yang panjang serta ketelitian yang baik dalam penyusunannya sehingga mampu menghasilkan suatu dokumen – dokumen perencanaan baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya dalam penerapan *e-planning* ini membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan ahli dalam hal teknologi informasi, sebab apabila seorang perencana tidak mampu memahami dan kurang pemahaman (*knowledge*) dalam hal penggunaan teknologi informasi terlebih terkait penggunaan *e-planning* maka hal tersebut akan berdampak pada penyusunan dokumen –dokumen perencanaan pembangunan daerah dan secara otomatis hal tersebut akan menjadi permasalahan yang serius dalam bidang perencanaan pembangunan. Sehingga paling minimal seorang perencana yang akan mengoperasikan *e-planning* ini sudah pernah mengikuti kegiatan

DIKLAT atau BIMTEK terkait penggunaan elektronik perencanaan (*e-planning*).

Selain itu bukan hanya terkait pemahaman yang harus dimiliki seorang perencana, lebih dari pada itu kuantitas atau jumlah perencana dalam suatu penyusunan dokumen perencana juga menjadi faktor pendukung dalam proses perencanaannya sebab keahlian atau sebaik apapun pemahamannya dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam hal perencanaan tetap saja membutuhkan tenaga ahli fungsional dalam bidang perencanaan yang cukup sebab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini membutuhkan ketelitian dan keserasian antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta suatu dokumen perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Tabel.1 1 Jumlah Pegawai Fungsional Perencana dan Non Perencana Pada Kantor BAPPEDA Kab. Bone**

No	Fungsional Perencana	Fungsional Non Perencana	Total
1	18	37	55

Sumber: Diolah Dari Kasubag Program. Bappeda Bone 2022.

Selanjutnya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tentu tidak berjalan mulus begitu saja, Akan tetapi dalam menyusun perencanaan pembangunan memiliki begitu banyak permasalahan yang sering dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana, seperti SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar

waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti apa yang diharapkan sebagaimana tertera dalam visi dan misi organisasi dalam dokumen Renstra SKPD.

Permasalahan lainnya yang biasanya kemudian muncul adalah adanya penyesuaian terhadap target dan tujuan rencana setiap tahun dalam renstra yang sering kali memunculkan permasalahan tentang apa perlu tidaknya mengadakan penyesuaian atau perubahan. Hal ini tentunya akan menyulitkan dalam proses penyusunan anggaran prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternatif rumusan-rumusan *action plan* dalam mencapai tujuan percepatan serta ketepatan pencapaian organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Dengan itu pemerintah harus dengan sigap mampu melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi salah satunya yaitu dengan memunculkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) atau biasa juga disebut *e-planning* sebagai tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih baik. *E-Planning* adalah aplikasi yang memberikan inovasi dalam proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS. Tentu hal ini akan menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi tools dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hal ini kembali dipertegas sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. *E-planning* pada

dasarnya berisi tentang beberapa menu- menu perencanaan semisal RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah hingga pada menu RPJPD.

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *e-planning*(elektronik perencanaan) sebagai salah satu bentuk implementasi *e-government* dalam tatanan pemerintahan serta sebagai inovasi dalam proses penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan yang dimana penerapannya dimulai pada tahun 2019 sejak disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Analisis Pemanfaatan *E-Planning* Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang kemudian ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemanfaatan *E-Planning* Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone ?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat penerapan *E-Planning* dalam menyusun rencana kerja tahunan dengan sistem informasi

pemerintah daerah (SIPD) pada badan perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Bone.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini:

##### 1. Akademis

Penelitian ini merupakan aktualisasi dari salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yaitu penelitian sekaligus menjadi sarana dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

##### 2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasidan masukan serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya lembaga pemerintahan daerah dan perangkat daerah di Kabupaten Bone dalam menyusun perencanaan dengan menggunakan Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dan Pengertian perencanaan**

##### **1. Pengertian Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu disiplin ilmu dan praktek yang dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan manusia yang berorientasi pada masa yang akan datang. Orientasi ke depan diasosiasikan melalui tindakan preskripsi atau peramalan yang menjadi ciri perencanaan. Dalam melakukan preskripsi, tentu sangat diperlukan upaya untuk menyeleksi atau menyaring elemen-elemen masa lalu yang digunakan sebagai acuan dalam menginput analisis kondisi eksisting. Selain itu perencanaan juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memberikan suatu perubahan masa depan sesuai dengan harapan. Sehingga hubungan dan keterkaitan antara situasi masa lalu, masa kini, dan masa depan merupakan komponen-komponen yang berkesinambungan. Ketiga komponen tersebut menjadi prasyarat yang harus dikuasai oleh perencana, untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Teori Perencanaan merupakan pengetahuan yang terorganisasi secara sistematis dan dapat diterapkan dalam berbagai keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan, menentukan strategi untuk mencapai tujuan, kemudian selanjutnya menentukan langkah – langkah untuk menuju tujuan. Dalam proses perencanaan, seorang perencana sebisa mungkin untuk dapat menggunakan berbagai teori baik teori lama maupun teori baru, supaya dapat mengkalaborasikan teori – teori tersebut yang dimana tujuan utama

dari perencanaan adalah bagaimana teori perencanaan dapat membangun suatu daerah menjadi lebih baik dan lebih maju.

Menurut Fainstein (2005:105) Teori perencanaan atau *planning theory* lebih banyak membahas tentang dimensi prosedural perencanaan dan teori urban atau *urban theory in planning* yang membahas terkait dimensi substantif dari perencanaan.

Sedangkan menurut Riyadi dan Brakusuma (2003:6) Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan bahkan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dan tepat yang berpegang pada azas prioritas.

Saat ini perencanaan menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam suatu penyusunan dokumen terlebih khususnya pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebab perencanaan tersebut akan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nantinya. Sehingga seiring perkembangan saat ini di era globalisasi muncul begitu banyak inovasi – inovasi terkait perencanaan. Salah satu inovasi baru yaitu munculnya *e-planning* atau elektronik perencanaan yang kemudian dimanfaatkan oleh para perencana dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan. Itulah alasan kemudian mengapa pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pemanfaatan yaitu upaya mempertahankan sifat bermanfaat yang berkesinambungan atau dalam artian terus menerus. Pemanfaatan pada



dasarnya berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah, yang memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik digunakan secara langsung maupun tidak digunakan tidak langsung agar dapat bermanfaat dan dipergunakan.

Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan *pe-an* yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto , 2002 : 125). Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Sedangkan menurut prof. Dr. J.S. Badudu (1994) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa “Pemanfaatan adalah, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”. Jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan sistem aplikasi *e-planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone.

Selain itu dalam suatu proses pemanfaatan *e-planning* sangat dibutuhkan suatu keahlian atau kehandalan dalam hal penggunaan teknologi sebab sistem elektronik perencanaan (*e-planning*) tidak akan dapat berjalan atau dioperasikan dengan baik apabila seorang perencana

yang kemudian menjalankan sistem tersebut kurang paham atau tidak ahli dalam hal penggunaan teknologi informasi sehingga itulah mengapa sangat dibutuhkan tenaga ahli fungsional perencana yang paham terkait penggunaan teknologi informasi dalam elektronik perencanaan (*e-planning*) sehingga mampu menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Pada dasarnya teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengguna teknologi sebagai media dalam pengelolaan informasi. Berikut beberapa pengertian teknologi informasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1) Haag dan Keen (1996)

Menurut Haag dan Keen teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

2) Martin (1999)

Menurut Martin teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya terdapat pada komputer atau laptop (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, namun mencakup seluruh kegiatan yang menyangkut terkait teknologi komunikasi untuk mengirim atau memperluas informasi yang ada. Dari pengertian diatas maka dapat ditarik benang merahnya bahwasanya teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat serta berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sudah memberikan pengaruh pada berbagai macam bidang kehidupan dan profesi, tentu hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sistem pada instansi atau perusahaan yang juga ikut merubah cara kerja mereka. Teknologi informasi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan sebab daya efektivitas dan efisiensinya yang sudah semakin terbukti mampu mempercepat kinerja. Kecepatan kinerja ini pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan atau omset yang masuk, baik secara finansial maupun jaringan.

Kemajuan yang paling terlihat pada perkembangan saat ini ialah pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data yang menjadikan informasi akan menjadi cepat dan dapat dilakukan secara otomatis dan akan memberikan informasi data yang akurat dalam suatu proses penyusunan perencanaan. Tentu saja untuk menjamin kualitas dari hasil pengelolaan teknologi informasi harus dilakukan rangkaian pengujian sebelum digunakan ataupun diimplementasikan.

Dalam perkembangannya Thomson mengemukakan bahwa "pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya yang dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya yang dijelaskan dalam teori yang Thomson et.al (1991:3) mengemukakan bahwa dalam pemanfaatannya terdapat tiga (3) indikator atau tolak ukur dalam penggunaannya adapun 3 indikator tersebut sebagai berikut: Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Sedangkan dijelaskan pula bahwa teknologi informasi telah menjadi satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari mekanisme kantor. Walaupun banyak program yang tersedia, namun akan sulit sekali jika digabung dengan personel yang tidak terlatih. Pemahaman (*knowledge*) secara lengkap dari sistem merupakan kunci dari efektivitas dari penggunaan sistem tersebut.

Sehingga pada dasarnya kebermanfaatan teknologi informasi tidak hanya dilihat seberapa besar intensitas pemanfaatannya, seberapa tinggi frekuensi pemanfaatannya dan seberapa banyak jumlah aplikasi yang digunakan namun lebih kepada bagaimana kemudian teknologi informasi tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan benar sebagaimana fungsi dan tujuannya. Tentu untuk mencapai pada tingkat tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan mumpuni dalam hal pengelolaan teknologi informasi yang ada. Dengan begitu tidak akan terjadi kesenjangan antara teknologi informasi dengan pengguna sistem yang ada dalam proses pelaksanaannya.

## 2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan tahapan atau suatu bagian yang cukup vital serta tidak dapat dilepaskan di dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional sebab perencanaan pembangunan menjadi acuan dalam suatu proses pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik sektor sumber daya manusia, sektor infrastruktur hingga kepada sektor ekonomi dengan beragam permasalahan dan karakteristik masing-masing daerah. Itulah mengapa kemudian perencanaan pembangunan hadir untuk mengatasi permasalahan yang ada disetiap daerah.

Secara teknis, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 4, dijelaskan bahwa idealnya perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan cermat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah supaya dapat tercipta suatu pembangunan yang baik sebagaimana tuntutan dan harapan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses yang dilakukan dalam perencanaan program pembangunan daerah mutlak diperlukan. Pemberian kepercayaan wewenang dan andil kepada masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah sepatutnya akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan tindakan melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu menyerap aspirasi serta masukan dan saran masyarakat secara umum mengenai program - program pembangunan yang akan di laksanakan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat sejalan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan serta yang diharapkan masyarakat secara umum pada setiap daerah.

Untuk mencapai tingkat *good governance* (pemerintahan yang baik) dalam tatanan pemerintah, peran stakeholders baik itu dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat sangatlah penting dalam merumuskan

perencanaan pembangunan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang relevan, maka tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga membutuhkan sinergi dan kalaborasi yang baik diantara seluruh *stakeholders* terutama partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

Selain memahami terkait perencanaan serta perencanaan pembangunan maka kurang lengkap apabila tidak dijelaskan terkait pembangunan itu sendiri. Menurut beberapa pakar, teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam dua paradigma, yaitu Modernisasi dan Ketergantungan (Lewellen 1995; Larrain 1994; Kiely 1995). Di dalam paradigma modernisasi termasuk teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan tersebut. Sedangkan dalam paradigma ketergantungan mencakup teori-teori Keterbelakangan (Underdevelopment), Ketergantungan (Dependent Development), dan Sistem Dunia (World System Theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994:130).

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004:10). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam

seluruh aspek kehidupan sehingga pembangunan yang terjadi sesuai dengan aspirasi dan kehendak serta harapan masyarakat..

Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis pendefinisian tersebut dapat diterima tetapi yang lebih jelas definisi tersebut kurang operasional sedangkan pada umumnya para ahli pengembangan wilayah ingin mencari tolak ukur kapan pembangunan itu dapat terjadi dan terealisasikan.

Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahapan pembangunan yang selanjutnya menuju pada harapan masyarakat yang adil makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dan sumber daya manusia (sdm) yang merupakan penggerak utama dalam suatu proses pembangunan yang tentu seirama dan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan proses perencanaan pembangunan yang didorong secara langsung dan saling memperkuat, saling terikat, dan terpadu dengan pembangunan bidang – bidang lainnya. Itulah mengapa kemudian perkembangan saat ini dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus berbasis teknologi informasi (*e-planning*) demi terciptanya suatu perencanaan pembangunan daerah yang baik.

## B. Konsep *Good Governance* Dan *E-Government*

### 1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Mardoto (2009:18) untuk mewujudkan konsep *good governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Menurut Prasitejo (2009:6) bahwa *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu, Kesejahteraan rakyat (*economic governance*), Proses pengambilan keputusan (*political governance*), Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*).

Menurut Efendi (2010:15) *good governance* menyentuh 3 pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar dalam berjalannya sistem



pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan keharmonisan dalam tatanan masyarakat.

Selain itu Menurut Zarkasyi dalam Saptapradipta (2013: 6) bahwa *Good governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan atau instansi. Dengan kata lain bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif

Oleh karena itu, dalam tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan perubahan dan perbaikan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan serta diselesaikan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Menurut Arie Soelendro (2000:13) dalam Arja Sadjiarto (2000) dalam jurnal

“Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” berpendapat bahwa unsur - unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini Adalah *transparency, fairness, responsibility* dan *accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) dalam jurnal yang sama “Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di setiap sektor pemerintahan serta sebagai bentuk pewujudan dari tuntutan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah supaya mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

*Governance* juga dapat diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). *World Conference on Governance*, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, (2007 : 2). “*Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007 : 36). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000. Dirumuskan pengertian *Good Governance*, yaitu: pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut beberapa ahli berdasarkan konteks reposisi administrasi publik, yang dimana Frederickson memberikan interpretasi *governance* dalam empat terminologi (1997: 84-87), yaitu Pertama, *Governance*, menggambarkan bersatunya sejumlah organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau swasta yang dipertautkan (*linked together*) secara bersama untuk mengurus kegiatan-kegiatan publik. Kedua, *Governance* sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku - bahkan disebut sebagai *hiper-pluralitas* untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak (*stakeholders*) dapat berupa: partai politik, badan-badan legislatif dan divisinya, kelompok kepentingan, untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan seraya mengimplementasikan.

Ketiga, *Governance* berpautan dengan kecenderungan kekinian dalam literatur-literatur manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi multi organisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi kebijakan.

Keempat, terminologi *Governance* dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai kepublikan. Dari keempat terminologi tersebut dapat ditarik pokok pikiran bahwa *governance* dalam konteks administrasi publik adalah merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal,serta disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif. Hal ini tentu dilakukan dengan tujuan supaya mampu meningkatkan dalam semangat kesetaraan dan *networking* (jaringan yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang akuntabel dan transparansi).

Selain itu *Good governance* menurut Mardiasmo (1998: 18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor politik oleh pemerintah yang baik. Lebih lanjut dari salah satu lembaga Bank Dunia yang dikutip oleh Wahab (2002: 34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi, dan investasi yang langka serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan.

Melani D. Selamat (2013) mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempersempit kesepuluh prinsip *good governance* ke dalam tiga prinsip utama, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam proses penelitiannya, *good governance* merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih dan juga merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh CUI-ITB (2004:45) mengenai keterkaitan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian *good governance* menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak berarti. Transparansi adalah syarat

bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip itu berhubungan secara sejajar (CUI-ITB, 2004: 45).

Sejalan dengan kesimpulan penelitian di atas, menurut Ndraha, konsep akuntabilitas pada awalnya berdasar dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rasional. Wewenang yang ketiga inilah yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dipimpinnya dan harus bersifat transparansi serta akuntabel (Ndraha, 2003: 85)

Oleh sebab itu salah satu upaya yang kemudian dilakukan sebagai bentuk inovasi dalam tatanan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) di era globalisasi saat ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam menjalankan pemerintahan, sebab hal tersebut menjadi tuntutan dalam roda pemerintahan saat ini sehingga mampu tercipta suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam hal ini inovasi yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah yaitu penggunaan teknologi informasi dalam bidang perencanaan atau elektronik perencanaan (*e-planning*) selain demi menciptakan pebaikan dari perencanaan dan pembangunan lebih dari pada itu ini juga menjadi turunan dari penerapan elektronik pemerintahan (*e-government*) untuk menghadirkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 2. Pengertian E-Government

Penerapan *e-government* bukan saja dipahami sebagai bentuk pengalihan kerja instansi pemerintah dari sistem kerja manual ke sistem komputerisasi atau berbasis online. Namun secara filosofis penerapan *e-government* menurut Zulhakim (2012 ; 5) dalam jurnal “Penerapan *E-Government* Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik” berpendapat bahwa bentuk kerja birokrasi yang secara dinamis mengalami distorsi pada lingkungan eksternal organisasi atau adanya tuntutan yang mengharuskan suatu perubahan dan perbaikan. Maka secara jelas bahwa penerapan *e-government* merupakan bagian dari perubahan mindset birokrasi, yang selama ini dianggap lambat dan memiliki banyak celah untuk terjadinya kesalahan.

Penerapan *e-government* dilakukan karena adanya pengembangan sistem informasi dan data serta seiring sejalannya perkembangan zaman saat ini untuk itu diselaraskan dengan proses birokrasi yang ada, sehingga dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi maka dapat mendukung proses birokrasi secara optimal. Penerapan *e-government* ini perlu adanya perencanaan dan desain model yang matang dengan melihat beberapa kebutuhan yaitu: 1) adanya kesesuaian antara visi, misi dan tujuan *e-government* dengan visi, misi dan tujuan pemerintahan; 2) adanya penyelarasan antara sistem informasi data dengan proses birokrasi; 3) strategi yang tepat guna; 4) memiliki proses yang terstruktur dan bertahap; dan 5) adanya dukungan sumber daya manusia maupun finansial yang sangat memadai. (Zulhakim, 2012 ; 5).

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa penerapan *e-government* merupakan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan

efektif dalam proses pelaksanaan pelayanan publik, agar lebih cepat terjangkau dalam memperluas akses publik untuk mendapatkan informasi, sehingga terciptanya asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan. penerapan *e-government* dilakukan sebagai wujud inovasi pelayanan publik yang diberikan institusi pemerintahan yang dapat meminimalisir kerja birokrasi, sehingga nantinya tujuannya adalah untuk meningkatkan level kepuasan masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah secara efisien, efektif.

Dengan demikian implementasi *e-government* disetiap institusi pemerintahan dari pusat hingga daerah akan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dengan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demi tercapainya inovasi public saat ini melalui penerapan *e-government* dapat mendorong adanya suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

*E-Government* merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. *E-Government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan

maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya pada birokrasi pemerintahan.

*E-Government* mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun nyatanya pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selanjutnya untuk mempekuat dasar maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *e-government*.

Seiring perkembangan yang terjadi maka definisi *e-government* memiliki berbagai macam definisi dari beragam lembaga dan pemerintahan. The World Bank Group mendefinisikan *e-government* sebagai berikut: “*e-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide AreaNetwork*, *Internet* dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (The World Bank Group, 2001).

Setelah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga memberikan definisi akan *e-government*, para ahli pun turut mendefinisikan *e-government*. Zweers and Planque (dalam Indrajit, 2004:4-5) memberikan definisi: “*E-Government* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau



produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan". Secara ringkas, dari berbagai definisi *e-government* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah sebuah penggunaan teknologi informasi secara elektronik melalui *Wide Area Network, Internet dan mobile computing* dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbatas tempat dan waktu guna mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif.

Dengan demikian dalam perkembangan teknologi informasi saat ini pada akhirnya memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan yang ada dimana kemudian memaksa untuk mengikut arus perkembangan tersebut sehingga hadirlah elektroik pemerintahan (*e-government*) yang dimana dalam sistem pemerintahan ini akan dijalankan dengan mengandalkan teknologi informasi yang ada sehingga dari perkembangan tersebut kemudian memunculkan suatu turunan dalam roda pemerintahan itu sendiri yang berdampak pada munculnya inovasi – inovasi baru dalam hal pemanfaatan teknologi informasi salah satu inovasi tersebut yaitu hadirnya elektronik perencanaan (*e-planning*) dalam suatu proses penyusunan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan pada setiap daerah maupun pusat. Dengan hadirnya inovasi tersebut maka sangat diharapkan akan mampu menghasilkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dengan pemberian suatu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sebab dengan pemerintahan yang baik akan menghasilkan suatu pelayanan yang baik pula, itulah mengapa kemudian sistem pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### C. *E-Planning*

#### 1. Pengertian *E-Planning*

*E-Planning* (Elektronik Perencanaan) merupakan suatu aplikasi yang dimanfaatkan untuk membantu dalam memudahkan perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis pada daring. Sistem informasi perencanaan pembangunan (*E-Planning*) bertujuan untuk memperbaiki hasil informasi yang dihasilkan serta membuat perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota bagi pemerintah daerah. Baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga ada penyusunan RENSTRA dan RENJA.

Menurut Juniawan (2019:288) *e-planning* adalah suatu paradigma baru dalam perencanaan yang muncul berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dari sistem perencanaan berbasis manual atau kertas sebagai sistem perencanaan konvensional. Merujuk pada Virgiana, Sari, & Rasuli (2018:19) menyatakan penyusunan *e-planning* berbasis komputer bertujuan untuk adanya konsistensi mulai dari penyusunan Renja pembangunan daerah yang merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penyusunan APBD. Selain itu juga bertujuan agar tidak ada lagi penumpang gelap dan mencegah terjadinya human error dalam penyusunan rencana APBD karena apabila hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada proses perencanaan nantinya. *E-Planning* juga bentuk transparansi yang diinginkan atau diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan *Good Governance*.

*E-Planning* menurut Nugroho, Djunaedi, & Setiawan (2017) dalam Kalalembang, Alwi, & Arianto (2019:145) mendefinisikan sebagai wadah dari berbagai aplikasi lain yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dan diharapkan dapat menghasilkan dokumen - dokumen perencanaan yang berkualitas karena dijadikan sebagai landasan/acuan untuk semua perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan dan program ke depannya agar sasaran dan tujuan perangkat daerah dapat sesuai dengan target rencana. Mirza (2014) juga mengungkapkan dalam Kalalembang et al. (2019:6) bahwa agar perencanaan dan implementasi pembangunan dapat sesuai dengan kondisi masyarakat maka perlu dibangun sistem komputerasi yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat mulai dari perangkat desa sampai ke perangkat pusat.

Sementara itu, disisi lain dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa dalam menggunakan perencanaan pembangunan berbasis elektronik/*e-planning* terdapat salah satu persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu daerah adalah dengan adanya fitur partisipasi publik pada tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di dalam sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-planning* sangat memperhatikan peran serta partisipasi masyarakat sebagai elemen utama dalam setiap penyelenggaraan pembangunan yang ada di daerah, terutama pada tahap penyusunan rencana pembangunan daerah.

Adapun landasan teori yang kemudian menjadi dasar dalam penelitian ini sekaligus menjadi indikator penelitian yaitu teori pemanfaatan *E-Government* menurut Richardus Eko Indrajit Dalam Bukunya yang berjudul

Konsep Dan Strategi *Electronic Government* (2016). Yang dimana di dalam teori tersebut membahas 3 (tiga) indikator utama dalam penerapan konsep – konsep digitalisasi pada sektor publik yang kemudian digunakan dalam pemanfaatan *e-planning* dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Adapun 3 indikator tersebut ialah sebagai berikut.

a. Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model mana jemen "*top down*", maka jelas dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya - Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- 1). Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
- 2). Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran

pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;

- 3). Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *e-Envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan
- 4). Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1). Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2). Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*; dan

3). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-Government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

c. Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang

bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan *e-Government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *e-Government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan semakin tinggi.

Selain itu Pemanfaatan konsep – konsep digitalisasi teknologi informasi dalam buku Richardus Eko Indrajit (2016), merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan yang diberikan. Dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa indikator dalam pemanfaatan *e-planning* yang menjadi dasar dalam penelitian nantinya. Dimana Pengukurannya berdasarkan Support, Capacity, dan Value. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja institusi maupun kinerja individu yang bersangkutan. Sehingga itulah mengapa kemudian dalam suatu penyusunan dokumen – dokumen perencanaan sangat dibutuhkan tenaga fungsional perencana yang betul – betul paham akan penggunaan teknologi informasi lebih khususnya dalam penggunaan elektronik perencanaan.

Selain teori Richardus Eko Indrajit (2016), terdapat pula teori terkait sistem elektronik perencanaan yang mengemukakan bahwa terdapat tujuh

dimensi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hanif Al Fatta (2009:5) dalam jurnal “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Banjar” mengatakan, bahwa karakteristik sistem elektronik perencanaan sebagai berikut:

1. Komponen-Komponen. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
2. Batasan (*Boundry*). Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem.
3. Lingkungan (*enviroment*). Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.
4. Masukan (*input*). Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
5. Keluaran (*output*). Sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
6. Penghubung (*interface*). Tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu dan berinteraksi.
7. Penyimpanan (*storage*). Area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagi data yang sama.

Walaupun demikian terdapat 2 teori terkait sistem elektronik perencanaan (*e-planning*), namun berdasarkan analisis dan hasil observasi



bahwa teori yang kemudian lebih relevan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone ialah teori yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit (2016), yang membahas terkait 3 indikator dalam penerapan *E-Planning* dan indikator tersebut selaras dengan permasalahan yang kemudian telah dibahas sebelumnya.

*E-planning* atau sistem informasi pemerintah daerah adalah sebuah alat penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dimana dalam elektronik perencanaan harus mampu menghasilkan suatu perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Menurut WD Juniawan (2019 : 285) menyatakan bahwa :

*“E-planning* adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi virtual reality) dari sistem perencanaan berbasis kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional. *E-planning* juga sering disinonimkan sebagai *e-government* atau pemerintahan digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah.

Menurut Hakim dalam Nugroho (2017:145) menyatakan bahwa :

”Aplikasi *e-planning* merupakan wadah dari berbagai aplikasi lain yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan aplikasi *e-planning* mampu menghasilkan rencana strategis (Renstra) yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan kegiatan selama 5 tahun kedepan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah akan sesuai dengan yang direncanakan.”

Environment Agency dalam sutanta (2010:3) mengemukakan bahwa :

*“E-planning* merupakan bagian dari inisiatif *e-government* yang mengacu pada proses penyampaian layanan perencanaan secara elektronik menggunakan internet. Itu bertujuan untuk meningkatkan proses perencanaan tata.

Selain itu *E-planning* merupakan suatu paradigma perencanaan pembangunan baru yang muncul dalam suatu proses perencanaan elektronik yang dimana kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi virtual reality) yang telah mengalami transformasi dari sistem perencanaan berbasis kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional menjadi perencanaan yang berbasis elektronik. *E-planning* juga sering disinonimkan sebagai *e-government* atau pemerintahan berbasis digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah.

Dari beberapa pendapat para ahli dan pakar diatas terkait *e-planning* maka dapat disimpulkan bahwa *e-planning* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini diharapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para *stakeholder*. *E-planning* disini menjadi alat bantu atau mediabagi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD dalam

proses kegiatan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Tujuan Dan Manfaat *E-planning*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 70 Tahun 2019 tentang penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah menyatakan bahwa aplikasi *E-planning* merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi proses perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan dalam aplikasi *E-planning* memiliki tujuan.

Sehingga secara umum tujuan dengan adanya *E-Planning* dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah:

- 1).menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi dalam sistem on-line dan off-line. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- 2).Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
- 3).Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.
- 4).Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

5). Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.

6). Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

Selain memiliki tujuan dalam proses perencanaan pembangunan aplikasi *e-planning* ini juga menjadi alat bantu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sehingga muncul beberapa manfaat dari adanya *e-planning* ini. Adapun beberapa manfaat diterapkannya aplikasi perencanaan *e-planning* yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara online
2. Database terintegrasi, data perencanaan digunakan untuk sistem lain (sistem anggaran, sistem evaluasi dan monitoring).
3. Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu.
4. Dapat lebih mudah melakukan pengawasan anggaran.
5. Proses perencanaannya lebih praktis dan mudah.

Sedangkan secara umum manfaat lain dari penerapan aplikasi *e-planning* antara lain :

1. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Dokumen Perencanaan baik menengah maupun tahunan sesuai indikator dan target kinerja yang telah disusun.
2. Membantu pihak Bappeda dan SKPD dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil Musrembang.

3. Membantu Bappeda dan SKPD dalam publikasi dokumen perencanaan ke tingkat daerah, Provinsi maupun pusat.
4. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Indikator Kinerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan *E-planning*

*E-planning* adalah suatu penerapan dari program *e-government*, tentunya sistem *e-planning* ini memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem *e-planning*.

#### 1. Kelebihan *E-planning*

- a). Fungsi perencanaan yang menjadi efisien Dalam hal ini pengguna *e-planning* memudahkan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ataupun rencana, kemudian dari rencana tersebut akan mudah diupload di sistem *e-planning* tersebut. Jika ada suatu rencana yang berhubungan dengan anggaran, maka dalam sistem tersebut bisa langsung kita ketahui berapa anggaran yang diperlakukan.
- b). Memudahkan dalam pengecekannya Apabila ada suatu rencana yang dianggap keliru, maka dengan itu pemerintah akan bisa melakukan pengecekan dari sistem *e-planning* ini, ini lah yang menjadi kemudahan dalam menggunakan sistem *e-planning*.
- c). Mudah dalam memasukan data pemerintah. Dalam melakukan penginputan data akan sangat mudah melakukannya slain itu data yang diinput akan tertata dengan baik danterurut didalam *e-planning* tersebut. Maka dari itu sistem ini akan mengurangi kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam proses input data.
- d). Membuat pemerintah di Indonesia menjadi lebih transparan Sistem *e-planning* dapat diketahui oleh masyarakat dimana saja, selagi mereka bisa mengakses media sosial/media massa. Masyarakat

akan mengetahui apa saja rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepannya dan mereka juga akan mengkritik terhadap rencana tersebut maka dengan begitu pemerintah akan mendengarkan masukan dari masyarakat, hingga akan menciptakan pemerintah yang demokratis.

## 2. Kekurangan *E-planning*

Selain memiliki beberapa kelebihan tentu saja *e-planning* juga memiliki kekurangan yang dimana sistem kadang belum siap dalam proses input data, masalah ini sering terjadi pada saat ingin melakukan input data di sistem *e-planning*, sehingga dengan begitu pemerintah akan terhambat pada mereka ingin memasukan data. Selain itu permasalahan yang biasa muncul seperti halnya terjadi *maintenance* pada aplikasi tanpa adanya informasi sebelumnya serta pada dasarnya aplikasi ini belum mapan dan sering terjadi eror pada aplikasi yang digunakan.

## D. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Perencanaan lebih khusus pada hal perencanaan pembangunan, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel. Hal ini sudah mulai digunakan pemerintah daerah dan tentu akan lebih memberikan kemudahan bagi perencana saat menyusun dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah lebih

khususnya dokumen rencana kerja tahunan sebab dengan sistem tersebut maka segala proses penyusunan rencana kerja semakin efektif dan efisien.

Sebagaimana yang telah ditegaskan melalui peraturan pemerintah dalam negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 menyatakan bahwa pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan secara nasional oleh pemerintah pusat maupun daerah. Instrumen ini telah mengintegrasikan tahapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi sehingga mampu memberikan suatu kemudahan bagi perencana dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bone telah mengimplementasikan instrumen SIPD untuk semua perangkat daerah terlebih khususnya dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Selain itu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Didalam sistem informasi pemerintah daerah mencakup beberapa bagian yang dimana membahas berbagai hal sistem pemerintahan, mulai dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi anggaran daerah hingga pada sistem informasi pemerintah daerah.

Adapun dalam pengelolaan sistem informasi ini hanya dapat dikelola atau diakses oleh para aparatur pemerintah yang memiliki akun *password* untuk login di sistem informasi pemerintah tersebut. Sebab didalam sistem

informasi pemerintah ini memiliki beberapa menu yang kemudian menjadi acuan bagi aparatur dalam mengoperasikannya salah satu menu tersebut ialah menu pada bagian sistem informasi pembangunan daerah yang membahas terkait dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah.



**Gambar 1.1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**

Sehingga dengan demikian sistem informasi pemerintah daerah ini menjadi suatu media teknologi informasi dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh setiap daerah sehingga sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini dikategorikan sebagai Elektronik Perencanaan (*E-Planning*) dalam penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) khususnya daerah Kabupaten Bone. Dengan hadirnya elektronik perencanaan ini tentu sebagai bentuk inovasi pemerintahan bahwa dalam suatu pengelolaan roda serta siklus pemerintahan harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini salah satunya mampu menjadikan teknologi informasi sebagai media pelayanan masyarakat sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sebagaimana harapan seluruh masyarakat.

#### E. Kerangka Pikir



Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan pustaka diatas maka peneliti merancang kerangka pikir yang menggunakan teori elektronik pemerintahan dengan menerapkannya pada suatu proses perencanaan yang berbasis elektronik (*E-Planning*) menurut Richardus Eko Indrajit dalam buku “Konsep Dan Strategi *Electronic Government*” (2016). Dalam pemilihan teori tersebut bermaksud untuk menjadikan sebagai acuan atau landasan serta indikator dalam penelitian nantinya. Lebih dari pada itu teori tersebut dimaksudkan untuk menganalisis Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses perencanaan yang dimana yang dimaksudkan disini ialah dalam penyusunan rencana kerja tahunan daerah Dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dengan menggunakan 3 (tiga) indikator utama sebagai berikut:

a. Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model mana jemen “*top down*”, maka jelas dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya - Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah

hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- 1). Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
- 2). Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
- 3). Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *e-Envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan
- 4). Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1). Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2). Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government; dan
- 3). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-Government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

#### c. Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri,

melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan *e-Government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *e-Government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan semakin tinggi.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

